

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang sudah dilakukan pada Bab III dapat disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah penelitian ini yaitu *Mengapa konflik antara pemerintah dengan pemberontak di Republik Afrika Tengah menyebabkan meningkatnya kekerasan seksual berbasis gender* adalah konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah dipengaruhi oleh aktor yang terlibat seperti negara, perempuan dan kelompok pemberontak. Ketiga aktor tersebut berperan penting dalam peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah. Negara terbukti tidak dapat menyediakan layanan kebutuhan dasar karena konflik yang berlangsung terus meluas di seluruh negeri. Kesehatan tidak dapat dijangkau oleh semua orang karena keterbatasan tenaga medis. Selain itu sekolah-sekolah yang mengalami penyerangan membuat angka partisipasi anak sekolah turun karena sekolah tidak beroperasi dan guru yang tersedia juga tidak memenuhi syarat. Negara juga belum meratifikasi protokol untuk melindungi hak-hak wanita yang menjadi korban KSBG.

Selain haknya yang belum terlindungi, perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Perempuan terdiskriminasi oleh hukum adat yang berlaku sehingga membuat perempuan memilih untuk diam dan tidak melaporkan karena perempuan akan menghadapi penolakan baik dari pasangan maupun keluarga. Selain itu, kasus KSBG juga jarang diselidiki yang membuat pelaku tidak dikenai hukuman. Pelaku KSBG sebagian besar merupakan kelompok pemberontak. Kelompok ini melakukan kekerasan seksual sebagai bentuk protes dan hukuman bagi perempuan dari kelompok pemberontak lain. Tindakan yang dilakukan kelompok pemberontak seperti perusakan fasilitas umum dan sekolah merupakan cara mereka untuk merebut kekuasaan.

Perempuan sebagai subjek yang terpinggirkan atau dianggap sebagai masyarakat kelas dua membuat mereka menjadi sasaran dalam perang. Adanya pengaruh budaya bahwa perempuan yang telah diperkosa atau mengalami KSBG merupakan aib bagi keluarga sehingga mereka harus keluar dan meninggalkan rumah. Selain itu hukum yang ada di RAT juga mengatur bahwa perempuan tidak dapat memiliki lahan kecuali hasil dari warisan keluarga. Sehingga kebanyakan perempuan yang menjadi kepala keluarga karena diperkosa ataupun ditinggalkan oleh suaminya membuat mereka berpindah dan mencari keamanan di negara lain. Hal ini yang memicu tingginya angka *Internally Displaced Persons* (IDPs). Angka partisipasi perempuan di ranah politik juga masih rendah. Perempuan di RAT masih dikecualikan dari

kewarganegaraan, karena tidak mendapatkan haknya secara penuh padahal telah tertulis dalam undang-undang RAT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang penulis uraikan pada Bab I yaitu Peningkatan KSBG karena dipegaruhi oleh faktor budaya dan pemerkosaan sebagai strategi perang. Stigma perempuan untuk diam ketika mereka menjadi korban kekerasan membuat perempuan mudah untuk dijadikan sasaran dalam perang. Konflik tersebut menggunakan pemerkosaan sebagai strategi dalam perang dilakukan untuk melemahkan musuh dan merusak tatanan sosial.

4.2. Saran

Walaupun hipotesis penulis sudah terbukti namun penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan. Pertama penelitian ini hanya berbasis kepada data-data yang tersedia secara luas di media online tanpa ada melakukan observasi langsung di lapangan. Karena penelitian ini menyangkut korban KSBG sebuah negara maka ada kemungkinan data yang tersedia di media online tidak akan seakurat dengan spesifikasi atau keadaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat memasukkan data hasil observasi langsung. Kedua penelitian ini juga belum menjelaskan mengapa setelah tahun 2017 jumlah *Internally Displaced Persons* (IDPs) meningkat akibat konflik yang masih berkejolak sampai sekarang.